

PEGIAT PEKERJA MIGRAN DI BANYUMAS DAN SUAMI BURUH MIGRAN

Hendri Restuadhi¹, Arizal Mutahir², Hariyadi³, Jarot Santosa⁴,
Nalfaridas Baharuddin⁵, Rahmad Santosa⁶

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, iki_hendri@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu syarat menjadi pekerja migran bagi perempuan adalah adanya ijin dari suaminya. Hal itu menunjukkan, jika suami memberi ijin, suami seharusnya sadar akan segala konsekuensinya yaitu kesejahteraan dan tumbuh kembang anak-anaknya yang harus berjauhan dengan ibunya. Ia harus mampu menjadi pengasuh bagi anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pegiat dan organisasi pekerja migran dalam upayanya meningkatkan praktik parenting dan kesadaran suami pekerja migran tentang relasi gender dan seksualitas sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan peran domestik-publik sekaligus. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pegiat pekerja migran di Banyumas sebagai sasaran penelitian dan suami pekerja migran yang saat penelitian istrinya masih bekerja di luar negeri dan mantan pekerja migran sebagai sasaran validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan aktivitas yang dilaksanakan oleh para pegiat pekerja migran dan organisasinya di Banyumas belum banyak menyentuh praktek parenting dan kesadaran suami pekerja migran akan relasi gender dan seksualitasnya. Selama ini, secara deterministik, pemisahan antara tugas di ranah domestik-publik telah menciptakan jarak relasi gender antara perempuan dengan laki-laki. Tugas domestik telah diidentikkan menjadi tanggung jawab perempuan sedangkan tugas publik adalah tanggung jawab laki-laki. Relasi gender yang terpisah semacam itu telah pula berdampak kepada seksualitas perempuan dan laki-laki.

Kata Kunci: *pegiat pekerja migran, suami pekerja migran, parenting, relasi gender, seksualitas*

ABSTRACT

One of the main requirements to be a migrant worker for women is a written approval from their husband. It shows that if husband gives her such approval, he has to recognize its consequences. He has duty to raise, nurture, and foster their children while the mother is away. This research objective is to uncover and describe the role of migrant worker activists in increasing ability of migrant worker husband in practicing parenting, gender relations, and sexuality so as to increase his role on domestic-public realm of life. This research was conducted in qualitative method. The subject/informant of this research is migrant worker activist in Banyumas. To validate data, this research also conducted interviews to migrant worker husband and former migrant worker. The research reveals that program and activities of migrant worker activist and their organisation in Banyumas has not encountered so

far the issues faced by migrant worker's husbands which are parenting, gender relation, and sexuality. The ongoing separation of role of domestic-public realm of life creates gender relation gap between women and men. The domestic role is the realm of women and public role is that of men. This kind of gender relation division affects their sexuality.

Keywords: *migrant worker activist, migrant worker husband, parenting, gender relation, sexuality.*

A. PENDAHULUAN

Pekerja migran perempuan meninggalkan anak-anak yang dikenal dengan sebutan *left-behind children*. Sebagai gambaran, pekerja migran perempuan di Banyumas, secara umum berusia 25 hingga 30-an tahun dan telah menikah (Restuadhi, 2016: 60-70). Melihat karakter demografis tersebut, pekerja migran perempuan meninggalkan anak-anak yang masih cukup belia, kalau tidak BALITA. Situasi keterpisahan anak dengan ibunya tersebut, menurut Amato dan Cheadle (2005), sangat merugikan kondisi pendidikan, kognitif, dan psikologis anak. Meski demikian, tidak berarti menjadi pekerja migran dan meninggalkan anak adalah kesalahan perempuan. Salah satu syarat menjadi pekerja migran bagi perempuan adalah adanya ijin dari suaminya. Hal itu menunjukkan, jika suami memberi ijin, ia sadar akan segala konsekuensinya, terutama dalam hal ini adalah, kesejahteraan dan tumbuh kembang anak-anaknya yang harus berjauhan dengan ibunya. Ia harus mampu menjadi pengasuh bagi anak-anaknya. Persoalannya, kutipan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amato dan Cheadle di atas, mengindikasikan bahwa suami atau bapak dari *left-behind children* tersebut tidak mampu menjadi pengasuh yang baik. Di samping itu, berbagai kajian dan penelitian serta upaya-upaya pemberdayaan terhadap perempuan pekerja migran dan keluarganya, tidak banyak yang menyentuh secara langsung persoalan kemampuan *parenting* suami pekerja migran ini¹. Di samping itu, persoalan menjadi semakin rumit ketika suami pekerja migran tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang hubungan gender (*gender relation*) dan dibiarkan hidup dalam karakter seksualitasnya sendiri.

Di sinilah menjadi menarik kiranya untuk mengkaji peran para pegiat pekerja Migran di Banyumas, khususnya, dalam meningkatkan praktik *parenting*,

¹ Antara lain, Tri Lisiani, dkk. (2011); Tyas Retno Wulan, (2010, 2014, 2017); visi misi Migrant CARE (diakses 25/11/2017)

kesadaran tentang hubungan gender, dan seksualitas suami pekerja migran. Sebagaimana di berbagai daerah di Indonesia, pegiat pekerja migran di Banyumas telah melakukan banyak hal dalam rangka memberdayakan dan memberikan pendampingan kepada calon pekerja migran, pekerja migran aktif, dan mantan pekerja migran. Di samping itu, untuk mempermudah program dan kegiatannya, para pegiat tersebut telah mengorganisir diri dalam organisasi-organisasi yang ditujukan untuk mengelola upaya pemberdayaan dan pendampingan tersebut. Kerjasama dengan lembaga dan atau instansi lain seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (Unsoed) pun telah sering dilakukan. Bahkan, Unsoed dapat dikatakan, telah menjadi “Rumah Kedua” bagi organisasi-organisasi pekerja migran melalui kerjasamanya dengan Pusat Penelitian Gender Anak dan Pelayanan Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPGAPM-LPPM) serta terumuskannya dan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Fakultas Hukum Unsoed dengan “Seruni” – salah satu organisasi pegiat pekerja migran Banyumas – yang diprakarsai oleh PPGAPM-LPPM Unsoed pada pertengahan April 2018 ini. Namun demikian, hampir seluruh kegiatan dan kerjasama tersebut lebih banyak terfokus kepada pekerja migran, anak-anaknya, dan keluarga yang ditinggalkan pekerja migran secara umum. Pada titik inilah kajian terhadap peran pegiat pekerja migran dalam meningkatkan praktik *parenting*, kesadaran hubungan gender, dan seksualitas suami pekerja migran di Banyumas memperoleh signifikansinya.

B. METODE PENELITIAN

Berangkat dari tujuan yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Setiap pegiat/aktivis mantan pekerja migran sudah barang tentu telah pernah mengikuti berbagai kegiatan dan aktivitas demi memberdayakan pekerja migran dan keluarganya. Oleh sebab itu, tidak sulit untuk menggali informasi tentang keterlibatan mereka dalam kegiatan dan aktivitas tersebut. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi pegiat pekerja migran dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas tersebut, dapat berlainan satu dengan yang lainnya. Di sinilah perlu kiranya untuk memperdalam informasi dengan

mengungkapnya langsung dari kisah-kisah yang dapat dituturkan oleh setiap pegiat mantan pekerja migran.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas merupakan daerah pengirim pekerja migran nomer empat terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 16 dari 25 kabupaten di Indonesia yang dikategorikan sebagai pengirim pekerja migran terbanyak di Indonesia (Puslitfo BNP2TKI, 2017). Data dari Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas juga menunjukkan bahwa pekerja migran tersebut didominasi oleh perempuan dan telah menikah (Wulan, 2015). Dengan demikian, dapat dikatakan, banyak suami dan anak-anak yang ditinggalkan oleh para pekerja migran tersebut dan membutuhkan perhatian. Di samping itu, pegiat mantan pekerja migran di Banyumas dapat dikatakan cukup aktif dalam melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya. Penelitian ini telah dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan yang dikenal sebagai “kantong buruh migran” di Kabupaten Banyumas yaitu Gumelar dan Sumbang.

Sesuai dengan tujuan penelitian maka sasaran dalam penelitian ini secara purposif adalah pegiat pekerja migran yang tinggal dan berkegiatan di Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, sasaran penelitian tidak dipandang sebagai sampel yang mewakili populasi melainkan seorang individu pegiat/aktivis mantan pekerja migran yang mengalami situasi sesuai konteks dalam penelitian ini. Data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam). Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, dilakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner setelah peneliti memperoleh gambaran dari kategorisasi hasil wawancara mendalam.

Dari sisi proses, penelitian ini melakukan analisis secara interaktif atau *ongoing analysis* (Miles dan Haberman 1992: 15-20; Taylor dan Bogdan, 1984: 128-129). Dalam proses semacam itu, peneliti melakukan analisis, baik secara bersamaan maupun serempak, antara pengumpulan data dengan analisis data itu sendiri. Sementara itu data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan model taksonomi dan domain (Spradley, 1997:139-185). Melalui kedua model tersebut, data diinterpretasikan dan dianalisis sesuai dengan konteks sosio-kultural dimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini, data divalidasi dengan menggunakan

model triangulasi. Dalam model ini, peneliti menjaga kemungkinan biasanya dengan jalan mewawancarai sasaran yang berbeda (Taylor dan Bogdan 1984: 68-70; Miles dan Huberman, 1992: 434-437). Untuk itu, dalam penelitian ini validasi data dan informasi akan dilakukan dengan jalan mewawancarai suami pekerja migran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya, masyarakat Indonesia mengenal organisasi non pemerintah (ornop) dan non profit *Migrant CARE* (MC)². Dapat dikatakan, MC adalah organisasi yang pertama dan telah cukup lama serta banyak memberikan perhatian dan melakukan pemberdayaan kepada pekerja migran dan keluarganya di Indonesia. Melalui visi dan misinya, MC yang didirikan tahun 2004 dan telah bekerjasama dengan donor internasional seperti *Ford Foundation* dan *Cordaid* ini, tentu saja telah melakukan banyak program dan kegiatan untuk memberdayakan dan mengangkat martabat serta daya tawar pekerja migran dan keluarganya. Oleh sebab tujuannya adalah memperkuat perlindungan yang diberikan lembaga-lembaga negara dalam hal hak-hak pekerja migran (MAMPU, 2017) dapat dimengerti kiranya kalau MC lebih berkonsentrasi kepada persoalan-persoalan makro yang dialami oleh pekerja migran. Melalui *official-web*-nya tidak ada satupun program dan atau kegiatan yang memberikan perhatian kepada kemampuan *parenting* suami pekerja migran dan kemampuannya dalam menyatukan peran publik dan domestik.

Di Banyumas, dapat dikatakan, ornop dan non profit yang telah cukup lama dan banyak memberikan perhatian dan melakukan pemberdayaan terhadap pekerja migran dan keluarganya, seperti halnya MC di atas, adalah “Seruni, Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas”. Ornop ini didirikan pada 8 Juni 2008 (Pusat Sumber Daya Buruh Migran, 2017). Beberapa aktivitas yang pernah dilakukan ornop tersebut dan terurai melalui *web*-nya, antara lain, adalah terlibat dalam pembentukan jaringan kerja PSDBM (2010), bersama dengan *Komunitas Pena Desa* juga terlibat dalam Gerakan Akses Informasi BMI (2013), dan upaya Paguyuban Seruni dalam memperjuangkan hak atas akses informasi bagi BMI dan

² Penulisan “CARE” dengan huruf besar didasarkan kepada *web* MAMPU – Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Diakses pada 26/11/2017.

keluarganya mulai diakomodir dalam Peraturan Daerah No.02/2015 Tentang Perlindungan TKI Kabupaten Banyumas (2015). Bersama *Infest Yogyakarta* dan *Komunitas Pena Desa*, “Seruni” menyelenggarakan pertemuan dengan SKPD di tingkat Kabupaten (Dinsosnakertrans dan Dinhubkominfo), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Komunitas BMI untuk melembagakan pertukaran dan distribusi informasi³. Gagasan yang selanjutnya disebut sebagai Saluran Informasi Buruh Migran ini selanjutnya mengerucut pada beberapa kegiatan seperti, pembentukan Tim Layanan Informasi TKI di tingkat desa yang terdiri dari pegiat komunitas BMI, kader desa, dan perwakilan perangkat desa, pembentukan forum diskusi dan kelas belajar “Sekolah Desa”, perbaikan/ penyediaan informasi TKI di *web* Dinsosnakertrans, pelatihan dan fasilitasi kelola *web* dan *email* desa oleh Dinhubkominfo, dan pelatihan perawatan warga dan optimalisasi media komunitas untuk distribusi informasi migrasi ketenagakerjaan. Informasi yang tersebar di *web* yang sempat diakses dalam penelitian ini, sebagian besar kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh “Seruni” adalah memberikan perhatian dan pemberdayaan kepada pekerja migran aktif dan mantan pekerja migran⁴. Hanya satu di antara *web* yang diakses menjelaskan tentang kerjasama “Seruni” dengan PPGAPM-LPPM Unsoed⁵ untuk membuat kegiatan yang diorientasikan kepada suami pekerja migran dan juga berita tentang kegiatan bersama antarsuami pekerja migran (Pusat Sumber Daya Buruh Migran, 2017). Tidak dijelaskan dalam *web* tersebut kegiatan dan aktivitas yang dilakukan berkat kerjasama antara “Seruni” dengan PPGAPM-LPPM Unsoed dan diorientasikan kepada suami pekerja migran.

Harus diakui perhatian dan pemberdayaan terhadap pekerja migran, baik calon, yang sedang aktif, maupun yang telah purna, tampak lebih *sexy* daripada terhadap suami para pekerja migran – yang aktif, khususnya. Tentulah bukan tidak menghargai usaha, upaya, perhatian, dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh para pegiat dan pemberdaya pekerja migran. Namun demikian, selama sebagian besar status pekerja migran perempuan adalah menikah dan, terlebih lagi, telah

³ Dalam *web* tidak disebutkan tahun terselenggaranya pertemuan tersebut.

⁴ Beberapa di antaranya adalah www.mampu.or.id, www.unsoed.ac.id, ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/viewFile/1275/1149. Kesemuanya diakses pada 26/11/2017.

⁵ Pusat Penelitian Gender Anak dan Pelayanan Masyarakat-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman.

memiliki anak, salah satu penentu keberhasilan tujuan pergiannya istri/ibu ke luar negeri adalah suaminya sendiri yang sekaligus bapak bagi anak-anaknya. Peningkatan peran para pegiat dan pemberdaya tersebut dalam meningkatkan kemampuan *parenting*, kesadaran hubungan gender, dan seksualitas suami pekerja migran, akan melengkapi seluruh daya upaya mensejahterakan dan mengangkat pekerja migran berikut keluarganya, suami dan anak-anak yang ditinggalkannya. Kenyataan yang ditemukan dalam penelitian ternyata berkata sebaliknya, aktivitas pegiat pekerja migran di Banyumas masih lebih banyak dicurahkan kepada calon pekerja migran, pekerja migran aktif, dan mantan pekerja migran. Pegiat pekerja migran, misalnya, berupaya untuk ciptakan situasi yang kondusif bagi keberangkatan pekerja migran. Hal ini dilakukan dengan jalan, antara lain, memastikan adanya ijin dari suami, ijin dari berbagai instansi terkait, perusahaan yang memberangkatkan (PJTKI), situasi di penampungan sebelum keberangkatan, dan tanggal-tanggal keberangkatan. Bagi pekerja migran yang telah berada di luar negeri, dilakukan pemantauan terhadap keluarga. Umumnya, jika telah memiliki anak, para pegiat pekerja migran memastikan pengasuh bagi anak-anak yang ditinggalkan dan komunikasinya dengan ibu mereka, serta memberikan ketrampilan pengelolaan remitensi. Sementara itu, bagi para mantan pekerja migran, mereka ini dilibatkan dengan beragam kegiatan di seputar upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Hal yang terakhir tersebut dilakukan agar mantan pekerja migran ini tidak lagi berkeinginan untuk berangkat ke luar negeri. Dalam aktivitas dan kegiatan yang befokus semacam itu, tidak mengherankan jika suami pekerja migran “hilang”, tak diperhatikan.

Suami pekerja migran adalah “figur yang rapuh”. Pernyataan tersebut, sudah barang tentu, hanya merupakan perumpamaan. Dengan perkataan lain, suami pekerja migran bukanlah seseorang yang memiliki kepribadian yang rapuh. Ia, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dalam situasi demikian itu, konsekuensinya, ia harus merelakan istrinya untuk ‘sementara’ meninggalkannya dengan anak-anaknya di rumah untuk mengganti perannya dalam memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Masyarakat menempatkan laki-laki dalam keluarga sebagai kepala keluarga yang, salah satu kewajibannya adalah, bertanggung

jawab dalam memenuhi nafkah seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi dan kondisi sosial tertentu, tidak sedikit laki-laki yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal ini dapat melahirkan tekanan dan ketegangan dalam dirinya; masyarakat secara umum masih menuntut tanggung jawab tersebut, sementara dalam kenyataannya, ia tidak mampu memenuhinya (Restuadhi, 2016). Dalam situasi demikian itu pula, ia harus “kehilangan” orang terdekatnya yang selama itu menemaninya yaitu istrinya. Perasaan “kehilangan” tersebut, dalam ungkapan seorang suami pekerja migran di Kalibagor, Banyumas: “Yaa *nek rasane yaa... sing nggo batir cerita langka*. Ibarate *nek ana* masalah apa *biasane nek bojone nang umah ‘kan curhate ming bojone*. *Akhire bojone langka ya kadang... curhate ming temen sing, temen deketelah...*”⁶ Dalam ungkapan demikian, suami pekerja migran tersebut menempatkan isterinya sebagai *partner*. Hal itu, sesungguhnya, menunjukkan bahwa ia bukanlah tipikal orang Jawa pada umumnya yang seringkali menempatkan isteri sebagai *konco wingking*⁷ yang lebih menempatkan isteri sebagai seseorang yang menjadi pembantu untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Sebaliknya, tersirat di balik pernyataan suami pekerja migran di Kalibagor tersebut, isteri adalah *partner* dalam menyelesaikan segala persoalan, baik di antara mereka berdua, rumah tangganya, kehidupan masing-masing, dan bahkan, persoalan-persoalan kemasyarakatan. Berangkat dari penempatan isteri seperti itulah, ketiadaan isteri di sisi suami, seakan, menimbulkan lobang yang menganga dalam kehidupan suami itu sendiri. Erich Fromm (1900-1980), dalam karyanya *the Art of Loving* (Apocastasis.net), menulis bahwa ikatan cinta kasih antara dua orang mampu meruntuhkan tembok penghalang di antara keduanya, muncul kedekatan, perasaan menyatu (*oneness*), dan pengalaman semacam itu merupakan sesuatu yang menggetarkan bagi mereka yang mengalaminya. Pernyataan suami pekerja migran di

⁶ Dalam bahasa Indonesia, kurang lebih: “ya kalau rasanya ya, ... kalau teman untuk bercerita tidak ada. Seperti, kalau ada masalah apa, biasanya kalau istri saya di rumah, curhatnya kepada isteri. Akhirnya istri tidak ada ya kadang... curhatnya dengan teman yang, teman dekatlah.”

⁷ *Konco* istilah Jawa untuk menyebut teman dan *wingking* yang berarti belakang. *Konco Wingking*, secara umum ditujukan untuk menjelaskan posisi isteri dalam masyarakat Jawa yaitu seorang isteri yang kewajiban utamanya adalah mengurus aktivitas kerumahtanggaan seperti memasak, mengurus rumah, dan mengasuh anak. Isteri di tempatkan di belakang, artinya, ia tidak di depan untuk berinteraksi dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Posisi itu, dalam kultur Jawa, menjadi urusan suami. Suami, dengan demikian, adalah representasi keluarganya – isteri dan anak-anak. Suami adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga.

Kalibagor di atas, dengan demikian, menyiratkan kedekatan dan *oneness* tersebut sehingga ia harus “mengganti” peran isterinya itu dengan orang lain yang, sudah barang tentu, tidak benar-benar dapat berperan seperti halnya isterinya.

‘Kerapuhan’ suami pekerja migran semakin tidak diperhatikan ketika tidak ada upaya khusus untuk mereka. Menurut seorang pegiat pekerja migran di desa Datar, Kecamatan Sumbang, Banyumas, hingga saat ini tidak ada program dan atau kegiatan yang ditujukan kepada dan atau melibatkan suami pekerja migran. Perlu diketahui, kegiatan untuk memberdayakan dan mendampingi pekerja migran di Banyumas secara umum, dapat dikatakan, diawali dan mulai marak dari para mantan pekerja migran di Sumbang. Pengorganisasian aktivitas para mantan pekerja migran pun dimulai dari sini. Sebagian para aktivisnya kini bahkan telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Aktivitas yang dilakukan, utamanya, adalah pendampingan kasus dan pemberdayaan terhadap mantan pekerja migran. Mereka juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dengan pemerintah daerah maupun organisasi-organisasi non pemerintah dan non profit untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mantan pekerja migran. Menurut aktivis dari desa Datar tersebut, pada sekitar tahun 2014 juga pernah dilakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan desa (di desa Cihujah, Cihonje, dan Karang Jengkol) dengan tujuan agar mereka dapat memberdayakan ekonomi rumah tangganya sehingga tidak perlu pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Sekedar sebagai deskripsi, usaha semacam itu juga dilakukan oleh Hanna Keraf yang mendidik 100 perempuan desa di Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan ketrampilan menganyam daun lontar (Kompas, 2018). Upaya-upaya semacam itu, jika serius dilakukan, dapat dikatakan, menjadi signifikan untuk memalingkan dan mengurangi minat perempuan meninggalkan keluarganya menjadi pekerja migran di luar negeri. Bekerja adalah salah satu hak azasi manusia yang, oleh sebab itu, tidak seorang pun berhak untuk menghalangi. Namun demikian, jika bekerja ke luar negeri merupakan satu-satunya upaya untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang tidak terhindarkan maka diperlukan untuk memberikan persiapan yang memadai bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, persiapan yang memadai dan perlu dilakukan adalah segala aktivitas dan kegiatan yang berkait dengan suami

pekerja migran itu sendiri. Hal itu menjadi semakin penting mengingat suaminya yang akan menjadi pengganti ketiadaan ibu bagi anak-anaknya.

Satu-satunya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan suami pekerja migran adalah pelatihan *fathering* yang dilakukan pada tahun 2011. Kegiatan tersebut, menurut aktivis dari desa Datar, sesungguhnya merupakan proyek penelitian yang dilaksanakan oleh Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia dari Jakarta (UI). Saat itu, menurutnya, kegiatan tersebut tampak membangkitkan semangat para suami pekerja migran yang mengikuti pelatihan *fathering* tersebut. Namun, oleh sebab kegiatan tersebut hanya merupakan satu bagian dari sebuah proyek penelitian maka tidak berlanjut. Dengan perkataan lain, hingga sekarang, tidak ada lagi kegiatan semacam itu. Kurangnya aktivitas maupun kegiatan terprogram yang ditujukan untuk memberdayakan maupun mendampingi suami pekerja migran memberi dampak kurang siapnya suami untuk menjadi orang tua tunggal sementara. Tidak terperhatikannya suami pekerja migran dalam kaitannya dengan isu-isu pekerja migran perempuan memberikan dampak yang tidak dapat dikatakan kecil.

Seperti telah diungkapkan di muka, masyarakat menghendaki laki-laki sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama bagi anggota-anggota keluarganya. Di sinilah, masyarakat menempatkan dan menuntut posisi seksualitasnya. Dengan demikian, ia adalah laki-laki sehingga ia harus bertanggung jawab atas terpenuhinya dan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Kepergian istrinya untuk mencari nafkah, dalam pengertian seksualitas seperti itu, tidak menggoyahkan posisinya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Bahkan, kalau pun remitensi istrinya menjadi satu-satunya sumber pemenuhan nafkah keluarga, hal itu seringkali masih dipahami dalam terminologi “membantu” ekonomi keluarga. Apalagi, kepergian istri untuk bekerja di luar negeri, menjadi berat bagi sebagian suami karena kehilangan *sexual partner*-nya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh seorang suami pekerja migran di Gumelar, Banyumas: “Nah *kiye sing abot banget. Nelangsa. Abot-abote wong kepingin ekonomine mandan ningkat. Resikone ya kudu gelem mbengi-mbengi dewekan, ora nana sing mbatiri turu*”.⁸ Pada titik inilah, jelas

⁸ Jawa: “Nah ini yang berat sekali. Menderita. Beratnya orang yang berkeinginan ekonominya agak meningkat. Resikonya ya harus mau malam-malam sendirian, tidak ada yang menemani tidur”

tampak bahwa suami pekerja migran masih hidup dalam seksualitas yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya. Ia sama sekali tidak terdidik untuk akhirnya dapat mengetahui, mengerti, dan memahami seksualitas istrinya. Dalam situasi demikian, suami pekerja migran juga sama sekali tidak mengetahui, mengerti, dan memahami pentingnya relasi gender, khususnya, dengan istrinya. Ia tidak mampu memahami bahwa kepergian istrinya adalah substitusi bagi “ketiadaannya” sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama.

Menurut seorang aktivis Unsoed yang sering bekerjasama dengan “Seruni” – organisasi aktivis pekerja migran dari desa Datar, Sumbang, Banyumas – kegiatan pemberian pelatihan *parenting* telah diberikan kepada suami pekerja migran di beberapa wilayah di Banyumas beberapa tahun lalu. Setidaknya, terdapat 2 (dua) kelemahan dalam kegiatan tersebut. *Pertama*, pelatihan tersebut telah dilakukan beberapa tahun lalu dan tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan lain yang berkaitan dan atau menjadi salah satu agenda tetap kegiatan para aktivis pekerja migran. *Kedua*, tema pelatihan tersebut – *parenting* – bukan tidak penting tetapi tidak mempersiapkan suami pada kesadarannya yang paling mendasar yaitu seksualitas dan relasi gender. Kelemahan pertama tersebut menunjukkan bahwa suami pekerja migran, sampai saat ini, tidak pernah menjadi fokus perhatian para aktivis pekerja migran. Hal itu dapat dimengerti karena persoalan-persoalan yang dialami oleh para pekerja migran perempuan, menurut banyak aktivis, telah terjadi sejak dari desa asal pekerja migran itu sendiri hingga pekerja perempuan tersebut bekerja di luar negeri. Fokus terhadap para pekerja migran perempuan ini, dengan demikian, telah menjadi prioritas utama. Kalau pun ada, prioritas kegiatan berikutnya, hal itu ditujukan untuk memberikan perhatian kepada tumbuh-kembang anak-anak yang ditinggalkan oleh pekerja migran perempuan tersebut. Kelemahan pertama tersebut, dapat dikatakan, menjadi fondasi bagi munculnya kelemahan kedua tersebut. Suami pekerja migran – dan laki-laki secara umum – hanya akan dapat memahami *parenting* hanya jika ia telah menyadari seksualitasnya dan bagaimana ia dapat membangun relasi yang penuh pengertian dengan istrinya. Dengan perkataan lain, jika suami pekerja migran masih hidup dalam seksualitasnya sebagai laki-laki seperti yang diinternalisasikan kepada tiap laki-laki oleh masyarakat dan oleh sebab pula ia diposisikan sebagai figur “penguasa” dalam keluarganya maka tidak mudah kiranya bagi suami pekerja

migran yang seperti itu untuk memahami dan, apalagi, bagaimana mempraktekkan *parenting*.

D. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis pekerja migran di Banyumas hampir tidak ada yang bersentuhan dengan suami pekerja migran. Suami pekerja migran seperti “hilang” dalam hiruk pikuk kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis pekerja migran. Dengan demikian, kontribusi para aktivis pekerja migran dalam menyelamatkan suami pekerja migran sangat rendah. Kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis pekerja migran di Banyumas terhadap suami pekerja migran adalah *fathering* dan *parenting*. Hal itu pun dilakukan beberapa tahun silam dan atas kerjasama dengan Fakultas Psikologi UI. Sampai saat ini, tidak tampak adanya prakarsa dari para aktivis pekerja migran di Banyumas untuk menindaklanjuti kegiatan semacam itu. Kurangnya perhatian dari para aktivis pekerja migran di Banyumas memberi kontribusi dalam meneguhkan karakter seksualitas suami pekerja migran yaitu tetap sebagai laki-laki sebagaimana masyarakat memposisikan dan menuntutnya. Di sini pula, kesadaran suami pekerja migran tentang relasi gender rendah. Ia menjadi tidak memiliki kesadaran yang memadai akan “ketiadaannya” sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama bagi keluarganya. Kepergian istrinya sebagai pekerja migran seringkali hanya dipandang sebagai “membantu” ekonomi rumah tangga. Kegiatan para aktivis pekerja migran Banyumas yang masih memprioritaskan pekerja migran perempuan dan anak-anak yang ditinggalkannya telah berkontribusi dalam kurang memadainya kemampuan suami pekerja migran dalam mempraktekkan *parenting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, C. J. *The long reach of divorce: Divorce and child well-being across three generations*. Journal of Marriage and Family. 2005. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4183659/#R18>. Diakses 23/11/2017.
- Azmy, AS. 2011. *Negara dan Buruh Migran Perempuan, Kebijakan Perlindungan*

- Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- BNP2TKI, 2016. *Laporan_Pengolahan_Data*. Diakses 22/11/2017.
- Ferrante, Joan. 2015. *Sociology, A Global Perspective*. Cengage Learning, Stamford, USA.
- Institute for Social Transformation. Transformation Gender Relations. Diakses dari <http://ist-tft.org/new/transformation-gender-relations/> pada 22 Maret 2018.
- Kuntari, Yeni dan Kusuma, Indra Wijaya. 2001. *Pengalaman Organisasi, Evaluasi Terhadap Kinerja Dan Hasil Karir Pada Kantor Akuntan Publik: Pengujian Pengaruh Gender*. Dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2001. Jakarta
- MAMPU – Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. <http://www.mampu.or.id/id/partner/migrant-care>. Diakses pada 26/11/2017.
- Migrant Care, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat. 2017. <http://migrantcare.net/profil/visi-misi/>. Diakses pada 26/11/2017
- Miles, MB dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nadia, Ita F. 2007. *Suara Perempuan Korban Tragedi '65*. Galang Press. Jakarta.
- Perangin angin, Normina Br dan Sukamto, Andreas. 2014. *Kontribusi Pekerja Perempuan Terhadap Pembentukan Pendapatan Keluarga, Studi Kasus : Pekerja Perempuan Industri Kerajinan Gerabah di Pedukuhan Kajen, Desa Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY*. Dalam *e-journal.uajy.ac.id*. diakses 25/11/2017
- Pikiran Rakyat, 8 Desember 2017. Kontribusi TKI. <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/12/08/261555/kontribusi-tki-rp-100-triliun-tahun>. Diakses pada 27/11/2017.
- Pusat Sumber Daya Buruh Migran, 2018. <https://buruhmigran.or.id/partnership/paguyuban-peduli-buruh-migran-dan-perempuan-seruni-banyumas/>. Diakses pada 25/11/2017.

- . <https://buruhmigran.or.id/2012/03/29/tki-banyumas-pemberdayaan-suami-tki-buruh-migran-suami-bmi/>. Diakses pada 26/11/2017.
- Restuadhi, Hendri. 2016. *Suami Buruh Migran, Antara Pelepasan Hasrat Seksual dan Pengetahuannya tentang HIV/AIDS*. Diterbitkan atas kerjasama Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed, PPAGM-LPPM Unsoed, Tanah Air Beta. Purwokerto.
- Sindonews.com. Kekerasan TKI. <https://daerah.sindonews.com/topic/192/kekerasan-tki>. Diakses 27/11/2017
- Solopos, 27 Nopember 2017. <http://www.solopos.com/2015/10/05/tki-tulungagung-dinsosnaketrans-tulungagung-prediksi-remiten-tki-lampau-rp25-triliun-649024>. Diakses pada 27/11/2017
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Diterjemahkan oleh Misbah Zulfa Elizabeth. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Suryakusuma, Julia. 2012. *Agama, Seks, dan Kekuasaan*. Komunitas Bambu, Jakarta.
- Taylor, Steven dan Bogdan, Robert. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods, A Search for Meanings*. John Wiley & Sons. New York, USA.
- Wulan, Tyas Retno. 2012. *Desa Sebagai Basis Migrasi Aman: Model Pemberdayaan Bagi Kepala Desa Dalam Mencegah Trafiking Di Kabupaten Banyumas*. LPPM Unsoed, Purwokerto.
- . 2014. *Bapak Tangguh, Keluarga Utuh: Studi Tentang Pola Asuh Bapak Pada Keluarga Buruh Migran Perempuan Di Kabupaten Banyumas*. Artikel dipresentasikan dalam *International Conference on Growing Up in One-Parents Families in The Asia Research Institute*, National University of Singapore.